

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Dalam Teori Agensi, terdapat dua pihak yang berkepentingan yakni agen dan *principal*. *Agent* adalah manajer perusahaan, sedangkan *principal* adalah para *stakeholder* yakni pemegang saham, kreditor dan investor. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Kristina (2016), apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi. Hal ini karena masing-masing pihak akan berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Dari pihak agen dalam hal ini dituntut untuk mencurahkan kemampuan profesionalnya demi meningkatkan nilai perusahaan yang dikelolanya. Sedangkan dari pihak *principal* sebagai pemilik perusahaan berkewajiban memberikan balas jasa kepada pihak agen dalam jumlah yang realistis dan adil serta pasti. Para *stakeholder* mengharapkan informasi yang berguna dalam memantau dana mereka yang ada dalam perusahaan tersebut atau mendapat informasi yang mendukung keputusan untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman. Di sisi lain, manajer cenderung akan memilih untuk fokus mencapai laba yang tinggi. Hal ini dikarenakan dari laba yang tinggi tersebut maka perusahaan akan dinilai telah beroperasi dengan baik dan kinerja para manajer juga dinilai dengan baik. Selain ini manajer juga memiliki

motivasi untuk mendapatkan bonus yang tinggi sehingga laba menjadi orientasi utamanya.

Konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan *stakeholder* (*principal*) menyebabkan adanya masalah keagenan, perilaku manajer yang tidak selalu bertujuan untuk kepentingan *stakeholder* (*principal*), tapi terkadang manajer berperilaku untuk kepentingan manajer itu sendiri tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan kepada *stakeholder* (*principal*). Ketidakseimbangan informasi atau yang disebut dengan kondisi asimetri informasi (*information asymmetric*) yang memacu terjadinya konflik keagenan karena perbedaan pengetahuan informasi dari pihak manajer (*agent*) dan *stakeholder* (*principal*) sehingga manajer bisa memanipulasi informasi laporan keuangan tanpa diketahui *stakeholder* (*principal*) kebenaran yang sebenarnya (Hardinsyah, 2013) dalam Tri dan Jundi (2014).

Menurut Anthony dan Givindarajan (1995) dalam Widyaningdyah (2001) teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Kontrak dibuat dan dilakukan untuk mengatasi masalah asimetri informasi. Pada perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executif Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Meskipun *principal* sudah memiliki CEO sebagai pengawas, terkadang *principal* juga mengalami kesulitan untuk selalu memonitori CEO secara terus-menerus. Dengan demikian *agent* tetap memiliki peluang untuk melakukan tindakan-

tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan fungsi dan mencapai tujuannya.

Salah satu tindakan yang dilakukan *principal* untuk mencapai fungsi dan tujuan adalah melaporkan laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan metode akuntansi. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi (*accounting conservatism*).

2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan prinsip yang digunakan manajer dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Hardiansyah (2013) dalam Tri dan Jundi (2014) konservatisme menggambarkan reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian untuk menjamin bahwa ketidakpastian dan resiko yang melekat dalam situasi bisnis tersebut dikendalikan dengan baik. Definisi tersebut tidak mencerminkan bagaimana akuntan menghadapi konservatisme. Sedangkan menurut Basu (1997) dalam Martha (2010), konservatisme merupakan sebuah tendensi yang dimiliki akuntan dengan mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi dengan mengakui laba dari pada mengakui kerugian.

Menurut pendapat Ghonzali dan Chariri (2007) dalam Indrayati (2010), juga menegaskan konservatisme berarti harus segera mengakui kerugian, biaya atau hutang yang mungkin terjadi dan tidak boleh mengakui laba, pendapatan atau aktiva sebelum benar-benar terjadi. Dengan kata lain mengakui rugi dianggap sebagai cara yang lebih aman

daripada mengakui laba yang masih belum diterima karena adanya unsur ketidakpastiannya.

Sementara itu, Lara, et al (2005), menyebutkan konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews*. Penerapan konservatisme bisa mencegah tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajer karena hak-hak *stakeholders* harus di pertimbangkan oleh manajer. Dengan konservatisme manajer tidak dapat melaporkan laba yang *overstated* sehingga laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi dan informasi tersebut dapat berguna bagi para *stakeholder* seperti investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusannya.

Konservatisme masih menjadi perdebatan dalam dunia akuntansi. Masih banyak pihak yang berdebat mengenai perlu atau tidaknya diterapkan prinsip konservatisme dalam menyusun laporan keuangan. Manfaat dan konsekuensi penerapan konservatisme juga masih menjadi hal yang dipertimbangkan. Di satu sisi ada pihak yang menganggap bahwa konservatisme perlu diterapkan, disisi lain ada pihak yang menganggap bahwa konservatisme mengurangi relevansi laporan keuangan.

Menurut penelitian Ahmed et al. (2000), konservatisme juga berperan dalam mengatasi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan deviden yang dibuat oleh perusahaan. Konservatisme juga dinilai dapat mengurangi manajemen laba oleh pihak

manajemen. Dengan penerapan konservatisme berarti *stakeholder* akan terhindar dari laba yang *overstated* dan ketidakpastian menjadi berkurang.

Watts (2003) menyatakan dalam artikel yang berjudul “*Conservatism in accounting Part II : Evidence and Research Opportunities*”, pengakuan konservatisme akuntansi antara lain: (1) *Earning/accrual measures*. Ukuran konservatisme yang kedua ini menggunakan akrual dengan mencari selisih antara *net income* dan *cash flow*; (2) *Earning/stock return relation measures*. *Stock market price* berusaha untuk merefleksikan perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba dalam nilai *asset-stock return* tetap berusaha untuk melaporkan sesuai dengan waktunya; (3) *Net asset measures*. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*.

Konservatisme akuntansi menyajikan biaya lebih tinggi dan laba lebih rendah, Apabila ada kenaikan laba pada periode berikutnya yang diakibatkan karena penerapan konservatisme maka itu berarti keuntungan yang semula ditunda pengakuannya pada periode berikutnya sudah terealisasi. Dengan demikian bukan berarti peningkatan laba yang terjadi pada periode berikutnya merupakan cermin tidak konservatisnya perusahaan (Watts, 2003).

Menurut Juanda (2007), penolakan terhadap konservatisme disebabkan oleh beberapa aspek yaitu: (1) Ketidakkonsistenan. Ketika laba yang dilaporkan terlalu rendah pada periode sekarang, maka pada periode

berikutnya laba akan dilaporkan terlalu tinggi; (2) Ketidakteraturan. Kebijakan perusahaan akan mempengaruhi tingkat konservatisme dalam laporan keuangan. Pemilihan metode akuntansi yang lebih konservatif adalah salah satu cara yang dapat mengurangi risiko kepada kreditor yakni menghindari pembayaran dividen secara berlebihan; (3) Penyembunyian. Investor mengalami kesulitan menentukan dan menemukan jumlah asset yang dilaporkan terlalu rendah; (4) Kontradiktif. Konservatisme akuntansi bertentangan dengan prinsip akuntansi lainnya antara lain prinsip kos, prinsip penanding, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan; (5) Konservatisme akuntansi tidak sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain, relevan, reliabilitas, dan komparabilitas.

Penerapan konservatisme yang berlebihan dan menyebabkan laba menjadi terlalu rendah, hal ini juga berarti para investor, kreditor dan pihak lainnya juga mendapatkan informasi yang kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Selain itu pengukuran dari tingkatan konservatisme akuntansi berbeda juga dapat memberikan hasil yang berbeda.

Saat ini konsep konservatisme akuntansi sudah bukan lagi merupakan karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual yang baru. Konservatisme dianggap tidak sesuai dengan kerangka teori IFRS dimana laporan keuangan berdasarkan IFRS harus bersifat dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan sebanding, tetapi tanpa bias konservatif. Sebagai ganti konservatisme maka dimunculkan konsep *prudence*. *Prudence* merupakan inklusi dari tingkat kehati-hatian yang dibutuhkan

dalam membuat estimasi yang diperlukan saat kondisi yang tidak pasti seperti aset atau *income* tidak *overstated* dan *liabilitas* atau biaya tidak *understated* (IAS dalam Godfrey et al., 2010). Dalam konsep konservatisme, laba dan pendapatan akan diakui jika benar-benar telah terealisasi, tetapi jika rugi akan segera diakui. Sementara itu, dalam konsep *prudence* ketika terjadi laba dan pendapatan atau menurunnya kewajiban dan beban, walaupun belum terealisasi tetapi akan diakui jika memang kriteria dalam pengakuan tersebut sudah terpenuhi.

Meskipun sudah tidak disebutkan lagi dalam IFRS, prinsip akuntansi konservatif masih dipertahankan (Hellman, 2007). Hasil penelitian Balsari (2010) dalam Aristiya dan Budi Harta (2014) juga menyebutkan bahwa konservatisme justru meningkat setelah adanya konvergensi IFRS di Turki. Sementara itu penelitian Aristiya dan Budi harta (2014) memberikan hasil sebaliknya di Indonesia, Konservatisme cenderung lebih rendah setelah konvergensi IFRS namun konservatisme itu sendiri masih banyak diterapkan.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Konservatisme Akuntansi

Ada banyak faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi, beberapa diantaranya adalah:

a. Corporate Governance

Corporate governance adalah konsep pengawasan perusahaan dengan monitoring kinerja manajemen dan memberikan jaminan bagi *stakeholder* terkait kualitas laporan keuangan dan meningkatkan

kinerja perusahaan itu sendiri. Mekanisme *corporate governance* dapat menjamin bahwa aset yang ada dalam perusahaan dikelola secara efisien (Lara, et al., 2005). Mekanisme tersebut dapat diwujudkan dengan:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Dewan Komisaris dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dewan komisaris harus memantau praktek pengelolaan perusahaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mengesahkan laporan keuangan. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Martha (2010) mengemukakan bahwa tugas-tugas utama dewan komisaris antara lain;

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.

- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
- d. Memonitoring pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan dimana perlu.
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu menerapkan prinsip-prinsip (KNKG, 2006) dalam Koyoga (2015) :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Wardhani (2008) komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk bisnis maupun kekeluargaan. Dengan adanya dewan komisaris yang independen, diharapkan tetap ada pihak yang dapat menjamin kualitas laporan keuangan dan memiliki sifat netral. Dewan komisaris independen diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Semakin dominan dewan komisaris independen maka manajer akan cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al.,2001). Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Dengan demikian dewan komisaris independen akan mempengaruhi perusahaan untuk menjadi lebih konservatif.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa rasio komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Hal ini dilakukan agar pengawasan terhadap manajemen semakin meningkat demi menghasilkan laporan keuangan yang terhindar dari manipulasi. Di sisi lain, peraturan BEI tersebut memberikan dampak yakni jumlah komisaris independen bagi perusahaan *go public* hanyalah pada batas minimal saja. Hal ini menyebabkan beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rasio atau proposi dewan komisaris independen sebagai variable independen mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Oleh sebab itu penelitian ini akan menggunakan pengukuran lain yaitu dengan melihat rapat dewan komisaris. Seringnya pertemuan yang dilakukan dewan komisaris dapat mendukung terciptanya *corporate governance* karena dewan komisaris bisa melakukan pengawasan dengan rapat (Cety dan Suhardjanto, 2010).

2. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional merupakan presentase jumlah saham dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak eksternal (Sari, 2014) dalam Tri dan Jundi, 2014.

Investor institusional merupakan kepemilikan perusahaan oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan. Kepemilikan institusional dihitung dengan persentase

saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total lembar saham yang beredar. Peterson dan Whitworth (2013) menyebutkan bahwa investor instusional akan menekan manajemen untuk lebih bersikap konservatif.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Suatu perusahaan dapat dimiliki pula oleh institusi atau lembaga. Dalam hal ini ada divisi khusus dibuat untuk mengolah investasi pada perusahaan tersebut. Institusi dapat memantau secara professional perkembangan investasinya melalui kontrol atas tindakan manajemen sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Institusi yang menjadi pemilik perusahaan dapat memantau perusahaan dengan lebih intens bahkan kebanyakan institusi sudah memiliki analis khusus untuk investasi.

b. Leverage

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber-sumber pendanaan (hutang) terhadap ekuitas perusahaan. *Leverage* juga didefinisikan sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Jika perusahaan telah mendapat

pinjaman dari kreditor, maka kreditor tentu ingin selalu memastikan keamanan dana yang dia pinjamakan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melihat angka *leverage*. *Leverage* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Debt to Asset Ratio (DAR)* yang menunjukkan besar asset perusahaan dibiayai oleh hutang. Tingkat *leverage* tinggi berarti dalam membiayai asetnya, perusahaan sangat tergantung pada pinjaman dari luar.

Kreditor juga memiliki kapasitas untuk meminta manajer agar lebih konservatif dalam melaporkan laba agar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tetap bisa dipantau oleh kreditor. Perusahaan dengan hutang yang tinggi berarti kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi operasional perusahaan (Lo, 2006) dalam Kristina (2016). Hal tersebut mengidentifikasi semakin besar hutang perusahaan berarti kreditor akan semakin ketat dalam memantau perusahaan. Dengan demikian, *leverage* yang semakin tinggi akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Selain itu terdapat pula teori lain yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi antara lain:

a. Bonus Plan berupa struktur kepemilikan manajerial.

Teori informasi memprediksi bahwa perusahaan cenderung untuk tidak menginformasikan kabar buruk untuk menaikkan harga saham (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Bagaimanapun informasi

privat perusahaan harus secepatnya disampaikan. Untuk perusahaan dengan kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, *free rider* akan berkurang dari investor kecil yang ada dan kos yang dikeluarkan lebih rendah untuk mendeteksi kecurangan. Dalam perspektif yang panjang, semakin rendah kos investor untuk mendeteksi kecurangan semakin tinggi probabilitas perusahaan untuk terdeteksi dan semakin tinggi kos yang diharapkan di masa mendatang (*net benefit*) dari peningkatan laba (Qiang, 2003).

Wibowo (2002) dalam menyatakan terdapat hubungan positif antara struktur kepemilikan manajerial dengan konservatisme akuntansi. Wardhani (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dengan cara memanipulasi laba.

b. *Political cost* berupa ukuran perusahaan

Bagi perusahaan, intensitas politik sering berkaitan dengan ukuran perusahaan (Watts and Zimmerman, 1986:235). *Political cost* mengungkapkan bahwa perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi

secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Akhirnya, manajer perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang menunda pelaporan laba untuk mengurangi tanggungan *political cost* oleh perusahaan.

c. *Dividen Payout Ratio* (DPR)

Bagi para pemegang saham, dividen merupakan keuntungan yang akan diperoleh, sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Presentase dari pendapatan yang akan diperoleh oleh pemegang saham sebagai *cash dividen* atau *dividen payout ratio*. Keputusan mengenai kebijakan dividen terkadang diintegrasikan dengan keputusan pendanaan dan investasinya. dalam kasus perusahaan membagikan laba, namun pembagian dividen rendah mungkin disebabkan karena manajemen sangat *concern* tentang kelangsungan hidup perusahaan (Sutoyo, dkk.2011).

4. Konservatisme Akuntansi di Indonesia

Konservatisme akuntansi sudah lama diterapkan oleh perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur. Salah satu faktor yang mendorong untuk menerapkan konservatisme adalah adanya peraturan atau regulasi yang memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menerapkan konservatisme.

Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dengan didukung oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu:

- a. PSAK No. 12 (Revisi 2008) yang mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) adalah perhitungan yang dapat menghasilkan laba lebih besar daripada metode *Last In Last Out* (LIFO) dan rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif karena biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Brilianti, 2013).
- b. PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang biaya depresiasi aset tetap dan pilihan dalam mengitung biaya depresiasi atau penyusutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balancing method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Semakin pendek umur ekonomis aset maka biaya penyusutan akan semakin tinggi dan perusahaan menjadi konservatif. Di sisi lain, metode penyusutan saldo menurun memiliki biaya lebih besar, sehingga angka laba yang tersaji menjadi lebih rendah yang berarti penyusutan saldo menurun (*diminishing balancing method*) merupakan metode yang lebih konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*) (Brilianti, 2013).
- c. PSAK No. 19 (Revisi 2009) untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus

pada standar lainnya. Metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah aset tidak berwujud yang serupa dengan penyusutan pada aset tetap meliputi: Metode garis lurus, metode saldo menurun berganda dan metode jumlah unit produksi. Periode amortisasi yang semakin pendek menyebabkan biaya amortisasi yang semakin besar pada tiap periodenya sehingga berakibat pula pada laba yang menjadi kecil. Dari ketiga metode amortisasi tersebut, metode saldo menurun berganda merupakan metode yang paling konservatif. (Brilianti, 2013).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai dewan komisaris, kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap konservatisme akuntansi :

1. Tri dan Jundi (2014) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kepemilikan institusional, *debt covenant*, *growth opportunities*, dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada periode tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kepemilikan institusional, *debt covenant*, *growth opportunities* dan profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Variabel *debt covenant* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

konservatisme akuntansi. Untuk variabel *growth opportunities* berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

2. Dewi dan Suryanawa (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan majerial, *leverage* dan *financial distress* terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel struktur kepemilikan majerial, *leverage* dan *financial distress* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa hasil penelitian terhadap variabel struktur kepemilikan majerial berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Untuk variabel *leverage* juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan pada variabel *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi.
3. Brilianti (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage* dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage* dan

komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan institusional, *leverage* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

4. Kristina (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan dewan komisaris, kepemilikan institusional, *leverage* dan spesialisasi auditor dengan konservatisme akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan *leverage* memiliki hubungan positif yang sangat lemah dengan konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan institusional akuntansi memiliki hubungan negatif yang sangat lemah dengan konservatisme akuntansi. Variabel spesialisasi industri auditor memiliki hubungan negatif yang kuat dengan konservatisme akuntansi.

5. Melissa, David dan Linda (2016) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bursa Malaysia dan Singapore *stock exchange* tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap konservatisme. Sedangkan secara parsial hasil penelitian variabel ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi, sedangkan untuk variabel *Leverage* dan

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerapan konservatisme akuntansi.

C. **Kerangka Konseptual**

Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme *corporate governance*. Dalam tugasnya sebagai pengawas, dewan komisaris menghendaki adanya laporan keuangan yang akurat, andal dan dapat dipercaya. Menurut Watt (2003); Ahmed dan Duellman (2007) dalam Wardhani (2008) menyatakan bahwa konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi yang diperlukan untuk membantu dewan komisaris dalam mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya. Selain itu, konservatisme juga dapat menghindari oportunistik manajer. Dengan demikian, dewan komisaris cenderung menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif.

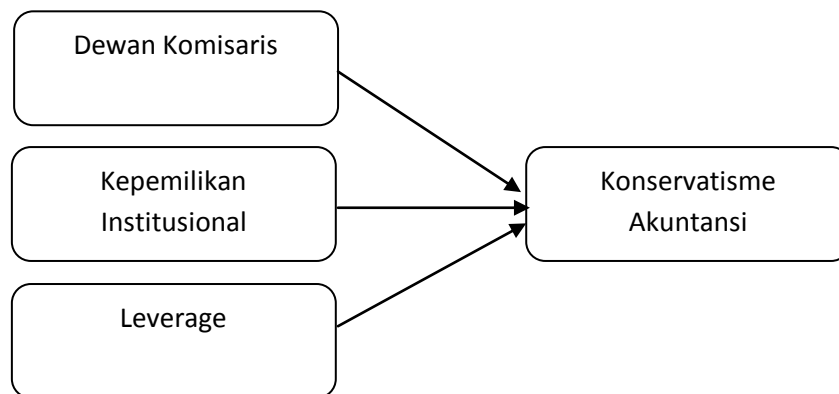
Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka ada mendorong pihak manajemen perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang konservatis.

Leverage dapat membantu perusahaan untuk melihat tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atas aset yang dimiliki yang dapat di

pantau oleh kreditur. Dengan tingkat *leverage* yang semakin tinggi akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Gita (2018)

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme Akuntansi

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang diterapkan perusahaan untuk menciptakan *good corporate* adalah dengan adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pihak yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dewan komisaris akan mencegah manajer untuk lebih hati-hati dalam mengakui laba (konservatif). Ahmed dan Duellman (2007) mengungkapkan bahwa *board of directors* yang kuat akan mendorong perusahaan untuk lebih

konservatif. Salah satu partisipasi dewan komisaris dalam mengawasi manajer adalah dalam bentuk rapat dewan komisaris. Semakin tinggi frekuensi rapat maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajer. Dalam peraturan BAPEPAM-LK (2010) dalam disebutkan bahwa perusahaan publik wajib mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan, diantaranya adalah frekuensi rapat dewan komisaris. Sesuai dengan uraian diatas, ditarik hipotesis:

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan akuntansi yang konservatif. Menurut Bushhe (1998) dalam Hardiningsih (2010:66) Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manager yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Sehingga kepemilikan institusional diharapkan dapat menekan kecenderungan pihak manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Wardhani (2008) dan Indrayanti (2010) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap konservatisme akuntansi. Peterson dan Whitworth (2013) juga

membuktikan hal tersebut dan menyatakan konservatisme diterapkan untuk melindungi investor. Maka diperoleh hipotesis:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Konservatisme Akuntansi

Leverage yang tinggi menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi hasil dari rasio ini maka cenderung semakin besar risiko keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dapat menyebabkan kreditur mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan (Lo, 2006) dalam Kristina (2016). Kreditur tentu tidak ingin salah dalam mengambil keputusan terkait dana yang dipinjamkan dan akan selalu memantau perusahaan tersebut untuk memastikan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk lebih konservatif. Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap konservatisme akuntansi. Dari penjelasan tersebut diperoleh hipotesis:

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi